

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	I
Halaman Judul	II
Lembar Pengesahan.....	III
Lembar Pengujian.....	IV
Lembar Pernyataan Originalitas Tesis	V
Motto	VI
Abstraksi	VII
Kata Pengantar.....	IX
Daftar Isi	XII
Daftar Perundang-Undangan	XVI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	6
Tujuan Penelitian.....	7
Manfaat Penelitian.....	7
Tinjauan Pustaka	7

Metode Penelitian.....	18
Pendekatan Masalah	18
Sumber Bahan Hukum	18
Prosedur dan Pengumpulan Bahan Hukum	20
Analisis Bahan Hukum	20
Sistematika Penulisan	20
BAB II AKIBAT HUKUM PELANGGARAN IZIN TERBANG	
BAGI PELAKU USAHA PENERBANGAN NIAGA	
2.1. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Lahirnya Izin.....	22
2.1.1. Pengertian Izin	22
2.1.2. Tujuan dan Fungsi Lahirnya Izin	25
2.2. Jenis-Jenis Izin Dalam Kegiatan Angkutan Udara Niaga	27
2.2.1. Macam-Macam Kegiatan Angkutan Udara	27
2.2.2. Jenis Izin Dalam Kegiatan Angkutan Udara Niaga Berjadwal.....	31
2.3. Prosedur Pengurusan Izin Terbang Pesawat Udara	38
2.4. Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pengangkutan Udara Indonesia..	42
2.5. Arti Penting Izin Terbang dan Akibat Hukum Pelanggaran Izin Terbang Oleh Pelaku Usaha	45

2.5.1. Arti Penting Izin Terbang Di Tinjau UUPK	45
2.5.2. Akibat Hukum Pelanggaran Izin Terbang Bagi Pelaku Usaha	48

BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA	
PENERBANGAN NIAGA ATAS JATUHNYA	
PESAWAT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN	
PENUMPANG SELAKU KONSUMEN	
3.1. Pelaku Usaha Penerbangan Bertanggung Gugat Kepada Penumpang Selaku Konsumen	53
3.2. Hubungan Hukum Pelaku Usaha Penerbangan Niaga Kepada Penumpang Selaku Konsumen	57
3.3. Macam-Macam Prinsip Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penerbangan	63
3.4. Tanggung Gugat Pelaku Usaha Penerbangan Terhadap Penumpang Selaku Konsumen	70
3.4.1. Dasar Hukum Pemberian Ganti Rugi bagi Penumpang dalam Penerbangan Niaga Domestik	70
3.4.2. Dasar Hukum Pemberian Ganti Rugi bagi Penumpang dalam Penerbangan Internasional.....	77
3.4.3. Asuransi Sebagai Bentuk Tanggung Gugat Pelaku Usaha bagi Penumpang.....	81

3.4.4. Upaya Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Kecelakaan Pesawat Udara.....	83
---	-----------

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	90
4.2. Saran.....	92

DAFTAR BACAAN.....	94
---------------------------	-----------



DAFTAR PERATURAN UNDANG-UNDANG

Burgerlijk Wetboek, Staatsblad, Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaran pelayanan terpadu satu pintu.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK 13/S Tahun 1971 tentang Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penggunaan Pesawat Terbang secara Komersial di Indonesia.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggarakan Angkutan Udara.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/195/IX Tahun 2008.